

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu kinerja perusahaan yang didalamnya mengandung informasi yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan dan investor untuk mengetahui laba dan keuntungan dari suatu perusahaan (Zelin, 2018). Tujuan dari laporan keuangan yakni menjadi alat komunikasi atau penyedia informasi oleh investor dengan kreditur saat pengambilan keputusan-keputusan berupa investasi atau pemberian kredit kepada perusahaan secara rasional. Salah satu standar penting yang harus dimiliki pada laporan keuangan adalah laporan keuangan harus bersifat andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas yang andal apabila informasi yang disajikan tidak menyesatkan untuk pembaca dan tidak salah secara material. Pada sebuah perusahaan laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sehingga manajemen berupaya untuk menyusun laporan keuangan secara akurat dan relevan agar dapat memberikan gambaran kinerja yang baik untuk perusahaan (Legowo, 2019).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh pemakai sebagai tolak ukur kinerja perusahaan yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi di masa mendatang. Laporan keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban perusahaan pada periode tertentu untuk menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan dengan mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) oleh auditor. Hal tersebut bertujuan agar perusahaan dapat menarik perhatian para investor baru. Maka dari itu, laporan keuangan adalah hal yang penting yang mempunyai pengaruh besar terhadap perusahaan itu sendiri (Dewi, 2020)

Laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja dari sebuah perusahaan. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang berkualitas akan dapat memberikan informasi yang tepat mengenai kondisi keuangan atau aktivitas operasional dari suatu perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan baik itu pihak internal perusahaan seperti manajemen perusahaan ataupun pihak eksternal seperti investor, kreditor, pemerintah, karyawan dan masyarakat luas (Natalia et al., 2021). Adanya ketentuan bahwa laporan keuangan perusahaan harus berkualitas, maka akan memaksa manajemen untuk memperlihatkan kondisi keuangan perusahaan yang selalu baik. Perbuatan seperti ini merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan atau fraud. Kecurangan yang dilakukan dengan niat manipulasi data keuangan yang sengaja dilakukan secara tidak adil dan mengakibatkan kerugian pihak lainnya demi keuntungan sendiri merupakan definisi *fraud* atau kecurangan/penipuan dari segi Hukum (Bawekes et al., 2018).

Kecurangan (*fraud*) merupakan perbuatan secara sadar dan perbuatan secara sengaja yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal tetapi dengan cara melakukan hal yang salah yang dapat merugikan orang lain. *Report to the Nation* yang dikeluarkan oleh Association of Certified Fraud Examiners (2022) menjabarkan fraud menjadi tiga cabang yang dikenal dengan sebutan *Occupational Fraud and Abuse Classification*

System yang terdiri dari *corruption*, *asset misappropriation* dan *fraudulent statement*. Seseorang yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi disebut dengan *corruption* atau korupsi. Seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi asset perusahaan tetapi melakukan suatu tindakan penyalahgunaan asset seperti pengambilan asset secara ilegal merupakan pengertian dari *asset misappropriation* atau penyalahgunaan aset. Seseorang yang melakukan kecurangan laporan keuangan dengan sengaja melakukan manipulasi atau melakukan kekelirauan dalam penyajian yang dipakai untuk mengelabui pemakai laporan keuangan sehingga menyebabkan terjadinya salah saji material di laporan keuangan perusahaan disebut dengan *fraudulent statement* *fraud* atau kecurangan laporan keuangan (Annisa Nurul, 2017).

Report to the Nation yang dirilis setiap dua tahun oleh *Association of Certified Fraud Examiners* menunjukkan pada tiga laporan terakhirnya, posisi Negara Indonesia masuk di dalam urutan lima besar tingkat fraud se Asia-Pasifik.

Grafik 1. 1 Fraud Indonesia se-Asia Pasifik



Sumber : ACFE (2018), ACFE (2020), ACFE (2022)

Berdasarkan grafik yang penulis buat tercatat pada hasil laporan tahun 2018 Indonesia berada di peringkat ketiga dengan jumlah 29 kasus dari 220 kasus yang

terjadi di Asia Pasifik. Untuk laporan tahun 2020 Indonesia berada di peringkat pertama dengan jumlah 36 kasus dari 198 kasus yang terjadi di Asia Pasifik. Terakhir, pada hasil laporan tahun 2022 Indonesia berada di peringkat keempat dengan jumlah 23 kasus dari 194 kasus yang terjadi di Asia Pasifik. Meski tampak trend yang naik turun namun berdasarkan data tersebut Indonesia masih memasuki urutan lima besar seAsia Pasifik, artinya negara Indonesia masih belum aman dari kasus *fraud*.

Untuk mengidentifikasi kecurangan laporan keuangan, terdapat banyak jenis model yang dapat digunakan: (1) *Beneish M-Score* model adalah model yang digunakan untuk membuat prediksi tentang kecurangan laporan keuangan yang dikembangkan menggunakan *logit regression*, dimana dalam model ini terdapat delapan rasio keuangan yang dapat ditentukan dan diuji menggunakan *principle componen analysis* (Beneish, 1999). (2) *F-score* merupakan model yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang dikembangkan dengan menggunakan teknik *scaled logistic probability* (Dechow et al., 2011). *F-score* model adalah pengembangan model *Beneish M-score* yang dirancang secara khusus agar pengguna bisa mendapatkan nilai atau score langsung tanpa menggunakan indeks dalam perhitungannya. Dan (3) *Restatement* adalah penyajian kembali laporan keuangan yang disebabkan karena kesalahan mendasar, transaksi dengan pihak istimewa, reklasifikasi dan penyajian yang bukan karena adanya perubahan kebijakan dan estimasi akuntansi yang diakibatkan dari penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. *Restatement* yang dilakukan oleh perusahaan sebagai tanda atau indikator terjadinya kecurangan laporan keuangan, sehingga dapat digunakan untuk pendeteksian

kecurangan laporan keuangan (Salavei & Moore, 2005) Model *Beneish M-score* dan juga model *F-score* memiliki kelemahan yaitu cenderung *understatement* jika laporan keuangan tidak memiliki data yang diperlukan untuk menghitung nilai *M Beneish* dan nilai *F*. Namun demikian, pengguna laporan keuangan tetap dapat mengidentifikasi *red flag* dengan melihat pola pergerakan nilai *M Beneish* dan nilai *F* (Hugo, 2019). Ak et al. (2013) menyatakan bahwa *F-score* adalah metode penelitian yang terkait dengan risiko kecurangan laporan keuangan yang mempunyai nilai akurasi yang tinggi sehingga metode ini baik untuk digunakan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian Association of Certified Fraud Examiners (2019) menunjukkan fakta bahwa lembaga yang paling dirugikan akibat fraud adalah 48,5% berasal dari lembaga pemerintah, kemudian 31,8% berasal dari perusahaan negara (BUMN) dan 15,1% berasal dari lembaga swasta, sedangkan untuk sektor industri yang paling dirugikan akibat fraud sebanyak 33,9% berasal dari perusahaan yang berstatus BUMN. Dalam data kapitalisasi pasar per Desember 2019 saham perusahaan dari BUMN termasuk dalam entitas dengan kapitalisasi pasar terbesar atau *Big Cap*. Perusahaan BUMN menguasai 24,3% dari total kapitalisasi dana di pasar modal Indonesia (Rizkiawan & Subagio, 2022).

Sumber modal dari BUMN yang terdaftar di BEI berasal dari suntikan dana pemerintah dan investasi yang dilakukan oleh stakeholder yang dimana pemerintah dan *stakeholder* mengharapkan adanya keuntungan dari modal yang mereka berikan berupa laba dan dividen. Jika kinerja BUMN terus merosot, maka akan berdampak pada penurunan pendapatan setiap tahun, sehingga untuk melaksanakan aktivitas operasional BUMN membutuhkan dana tambahan, baik

dari dana pemerintah dan *stakeholder* itu sendiri maupun pinjaman utang dari kreditur. Pemerintah dan *stakeholder* akan memberikan dana jika kinerja dari badan usaha dalam keadaan baik, hal tersebut akhirnya dapat memicu banyak BUMN yang melakukan kecurangan yang bertujuan agar kinerja keuangan yang ada di laporan keuangan terlihat dalam keadaan yang baik, sehingga pemerintah dan *stakeholder* tetap memberikan suntikan dana dan percaya terhadap kinerja badan usaha tersebut (Novita, 2022)

Thohir (2020) menyatakan bahwa banyak perusahaan BUMN berani melakukan manipulasi laporan keuangan dengan mempercantik laporan keuangan tersebut atau yang dikenal dengan *window dressing*. Perusahaan BUMN selalu berusaha untuk memperlihatkan laporan keuangannya terlihat baik tetapi kenyataannya perusahaan tidak sedang dalam keadaan baik. Hal ini diperjelas dengan banyaknya kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi dalam perusahaan BUMN. Hal ini dapat disaksikan dalam beberapa kasus sebagai berikut yaitu salah satunya adalah kasus PT Asuransi Jiwasraya. Dimana pada tahun 2018, media aktif memberitakan perusahaan asuransi milik negara tertua dan terbesar yaitu PT Asuransi Jiwasraya. Pasalnya, Jiwasraya telah gagal dalam membayar atas klaim polis asuransi yang sudah jatuh tempo sebesar Rp 802 miliar pada Oktober dan mencapai Rp 12,4 triliun per Desember 2019 (Muchlis, 2019). Hal ini terjadi karena Jiwasraya membeli saham lapis kedua dan ketiga menjelang akhir periode untuk “mempercantik” laporan keuangan milik perusahaan, kondisi ini sering disebut dengan *window dressing*. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan, Jiwasraya diketahui berinvestasi saham di tempat yang harganya naik secara signifikan di akhir tahun, lalu saham itu dijual kembali pada bulan Januari

tahun berikutnya. Salah satu Big Four Accounting Firm yaitu Pricewaterhouse Coopers mengatakan opini tidak wajar atas laporan keuangan Jiwasraya periode 2017, karena Jiwasraya hanya mencatat hutang atas polis masa depan sebesar Rp 38,76 triliun yang seharusnya Rp 46,44 triliun. PwC juga melakukan koreksi terhadap laporan tersebut dari laba sebesar Rp 2,4 triliun menjadi Rp 428 miliar. Kasus lainnya terjadi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Dimana kantor akuntan publik yang pada saat itu memiliki tanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan terlibat dalam praktik kecurangan yang dilakukan perusahaan. Dampaknya adalah akuntan publik menerima hukuman dari Menteri Keuangan yaitu pembekuan izin selama satu tahun (Hartomo, 2019). Kasus lainnya juga terjadi di PT Indofarma Tbk (Finance, 2004). PT KAI (Persero) dan PT Kimia Farma Persero Tbk (Sandria, 2021). Kasus-kasus tersebut tentu dapat mencoreng citra baik yang dimiliki badan usaha itu sendiri yang gagal dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMN.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan maka dibutuhkan alat yang dapat dipakai saat pendeteksian kecurangan laporan keuangan. Teori *fraud hexagon* merupakan salah satu teori yang dapat digunakan dalam pendeteksian laporan keuangan. Teori ini terdiri dari enam faktor penyebab terjadinya fraud yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi, arogansi serta kolusi yang merupakan variabel tambahan dari penyempurnaan fraud sebelumnya (Vousinas, 2019). Dipilihnya teori *hexagon fraud* dalam penelitian ini, dikarenakan teori ini adalah penyempurnaan kembali dari teori fraud sebelumnya yang telah ditemukan oleh Cressey tahun 1953 yakni *triangle fraud*, *diamond fraud* yang dikembangkan oleh

Wolfe dan Hermanson tahun 2004, dan *pentagon fraud* yang dikembangkan oleh Crow tahun 2010. Oleh karena itu, teori ini diharapkan dapat lebih akurat dan baik dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan.

Menurut Martantya & Daljono (2013) suatu dorongan yang disebabkan oleh suatu keadaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan kecurangan disebut dengan faktor tekanan. American Institute of Certified Public Accountant (2003) menyatakan bahwa kecurangan laporan keuangan bisa terjadi karena manajemen perusahaan mendapatkan tekanan dari pihak eksternal yang mendorongnya untuk melakukan kecurangan yang dapat disebabkan oleh keadaan ekonomi, atau kebutuhan *financial* yang mendesak dan situasi lainnya.

Ketika perusahaan berada dalam situasi ekonomi yang terancam, manajer akan mencoba untuk menyembunyikan situasi ekonomi perusahaan dengan cara melakukan pinjaman (hutang) kepada bank, pihak ketiga atau pihak lainnya. Ketika manajemen perusahaan melakukan pinjaman kredit maka akan berpengaruh pada peningkatan rasio *leverage*. Ketika perusahaan memiliki hutang yang besar, maka rasio *leverage* juga tinggi yang menyebabkan resiko kredit yang dimilikinya juga tinggi. Semakin tinggi resiko kredit, semakin besar tingkat kekhawatiran kreditor untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan. Oleh karena itu, hal ini menjadi hal yang dikhawatirkan perusahaan dan dapat menjadi salah satu alasan pemicu dalam munculnya kecurangan laporan keuangan (Nafsiyah, 2019).

Penggunaan proksi rasio *leverage* ini mengacu pada penelitian Faradiza (2019), dan Rusmana & Tanjung (2019) mengatakan jika rasio *leverage* yang merupakan proksi variabel tekanan berpengaruh positif terhadap kecurangan

laporan keuangan. Penelitian Larum Kordianus et al., (2021) dan Legowo (2019) mengatakan jika leverage berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh P. N. Sari & Husadha (2020) dan Zelin (2018) menyatakan bahwa *leverage* sebagai proksi variabel tekanan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Menurut Siddiq et al (2017) kompetensi merupakan bentuk keahlian dari seseorang dalam memanfaatkan situasi dan kondisi pengendalian internal yang lemah untuk melakukan tindakan kecurangan. Seorang pelaku kecurangan dikatakan mempunyai kemampuan jika mampu dengan mudah mempengaruhi orang untuk ikut terlibat, mampu berbohong dengan baik dan dapat mempertahankan kontrol emosi dengan baik pada saat dilakukan investigasi (Priantara, 2013). Perubahan direksi dinilai mampu untuk memberikan penjelasan mengenai kompetensi yang dimiliki oleh direksi yang dapat menyebabkan *stress period* sehingga dapat menyebabkan semakin besar peluang manajemen untuk terlibat dalam kecurangan laporan keuangan (Wardhani, 2018). Perubahan direksi juga dilakukan sebagai suatu upaya perusahaan untuk memperbaiki kinerja direksi sebelumnya dengan melakukan perubahan susunan direksi ataupun perekrutan direksi baru yang dianggap lebih berkompeten. Perubahan direksi juga dianggap dapat mengurangi efektivitas dalam kinerja karena memerlukan waktu lebih untuk beradaptasi dengan culture direksi baru (Azizah,2020). Penggunaan proksi perubahan direksi mengacu terhadap penelitian Faradiza (2019) dan Rizkiawan & Subagio (2022) yang mengatakan bahwa pergantian direksi memiliki pengaruh positif dan signifikan atas potensi adanya kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari

dan Nugroho (2019) dan Rusmana & Tanjung (2019) mengatakan bahwa jika peran direksi yang menjadi proksi kompetensi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Menurut Azizah (2020) *Fraud* tidak hanya terjadi jika ada tekanan, tetapi juga ketika calon pelaku melihat adanya peluang untuk melakukan kecurangan. Peluang muncul ketika pengendalian internal lemah seperti kelemahan dalam melakukan audit yang tidak dilakukan secara rutin ataupun mempunyai kelemahan dalam pembagian tugas bagi karyawan. Sehingga hal ini akan menjadi celah bagi manajemen ataupun karyawan untuk memanfaatkan keadaan tersebut dan melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan pribadinya. Peluang diproksikan dengan Ketidakefektifan Pengawasan.

Ketidakefektifan Pengawasan (*Ineffective Monitoring*) merupakan lemahnya perusahaan dalam mengawasi jalannya kinerja perusahaan, sehingga dampak dari lemahnya pengawasan manajemen akan menimbulkan tindakan fraud dalam laporan keuangan. Pengawasan erat kaitannya dengan dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris yang lebih besar dapat mencegah tindakan fraud dalam perusahaan (Nafsiyah, 2019). Penggunaan proksi Ketidakefektifan Pengawasan mengacu terhadap penelitian Faradiza (2019) dan Kusumosari & Solikhah (2021) mengatakan jika ketidakefektifan pengawasan yang merupakan proksi variabel peluang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rosmana dan Tanjung (2019), Rizkiawan & Subagio (2022) menyatakan bahwa ketidakefektifan pengawasan yang merupakan proksi variabel peluang tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Rasionalisasi merupakan adanya tindakan pembenaran atas kecurangan yang sudah dilakukan oleh pihak – pihak tertentu yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan fraud. Rasionalisasi dilakukan oleh anggota internal maupun eksternal perusahaan untuk membenarkan tindakan kecurangan (Azizah, 2020). Rasionalisasi dipengaruhi atas rendahnya seseorang yang menyebabkan timbulnya pola pikir dimana seseorang tersebut merasa benar ketika melakukan kecurangan (Diany & Ratmono, 2014).

Pada penelitian ini pergantian auditor merupakan proksi variabel rasionalisasi. Pada perusahaan, tugas untuk memantau dan menganalisis laporan keuangannya yang sudah selesai disusun perusahaan dilakukan oleh auditor. Auditor dapat mencium informasi terkait perusahaan yang terindikasi melaksanakan kecurangan. Perusahaan yang umumnya terlibat dalam kecurangan laporan keuangan akan sering melakukan perubahan terhadap auditor dengan tujuan untuk memperkecil kemungkinan pendeteksian oleh auditor yang lama dengan anggapan bahwa auditor baru belum memahami keadaan perusahaan dengan baik dan sebagai bentuk usaha perusahaan untuk menghapus jejak fraud yang diperoleh auditor sebelumnya. Menurut Rosmana dan Tanjung (2019) semakin sering perusahaan mengganti auditor maka perusahaan kemungkinan melakukan manipulasi laporan keuangan karena auditor merupakan pihak yang memiliki sikap independen yang tinggi untuk mengungkap kecurangan laporan keuangan. Penggunaan proksi pergantian auditor mengacu terhadap penelitian Rizkiawan & Subagio (2022) dan Setyono et al., (2023) yang mengatakan jika pergantian auditor yang merupakan proksi variabel rasionalisasi berpengaruh positif terhadap

kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Faadiza (2019) dan Rusmana & Tanjung (2019) menyatakan bahwa pergantian auditor yang menjadi proksi variabel rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Menurut Crowe Howarth (2011) Arogansi merupakan sifat angkuh atas hak yang dimiliki seseorang. Pada umumnya sifat arogan akan muncul ketika seseorang menyadari bahwa dirinya memiliki peran yang penting di dalam sebuah perusahaan sehingga memiliki hak untuk mennetukan segala arah gerak perusahaan. Pelaku fraud menganggap bahwa dirinya merasa bebas dari peraturan, kebijakan serta kontrol internal perusahaan sehingga mereka tidak merasa bersalah telah melakukan kecurangn laporan keuangan (Bawekes et al., 2018). Sifat arogansi CEO yang tinggi dapat menyebabkan kecurangan laporan keuangan, hal ini karena CEO yang mempunyai arogansi yang tinggi dapat menyebabkannya melakukan berbagai cara untuk melindungi status, jabatan dan juga kedudukan yang dimilikinya salah satunya dengan melakukan kecurangan laporan keuangan. Seorang CEO yang tidak mau kehilangan jabatan serta status yang dimilikinya biasanya akan lebih sering menunjukkan kepada publik bagaimana status dan jabatan mereka di annual report (Septriani & Handayani, 2018). Penggunaan proksi frekuensi kemunculan gambar CEO mengacu terhadap penelitian Sari dan Nugroho (2020), Isalati Nadhiya Shabrina et al., (2023) dan Legowo (2019) yang membuktikan bahwa banyaknya gambar CEO terpampang dalam laporan tahunan merupakan faktor yang mendukung sifat arogansi dan berpengaruh positif terhadap potensi terjadinya tindakan kecurangan laporan keuangan. Penelitian yang dilaukan oleh Larum Kordianus et al., (2021)

menyatakan bahwa arogansi memiliki pengaruh pada potensi kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Faradiza (2019) dan Rusmana & Tanjung (2019) menyatakan bahwa arogansi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Menurut Vousinas (2019) kolusi merupakan sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan penipuan dari pihak ketiga atas hak yang dimilikinya. Tujuan kolusi yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dilakukan dengan berbagai cara yang mana tindakan ini melawan hukum yang ada. Kolusi menyebabkan adanya sebuah kerjasama antara pelaku-pelaku fraud sehingga terjadi skema penipuan yang besar dan menyebabkan total kerugian yang besar bagi korban penipuan (Vousinas, 2019). Sehingga semakin tinggi tingkat kolusi akan mempengaruhi kecenderungan kecurangan yang terjadi. Kolusi diprosikan dengan koneksi politik. Menurut Chaney et al., (2009) suatu perusahaan yang memiliki hubungan politik yang kuat akan cenderung memiliki beberapa keuntungan seperti lebih mudah mendapat pinjaman, mendsapatkan kontrak dari pemerintah dan ketika perusahaan sedang mengalami *financial distress* akan lebih mudah di berikan jaminan oleh pemerintah. Kedekatan antara perusahaan dengan pemerintah atau politisi dan lainnya yang disebabkan adanya hubungan politik juga memberikan keuntungan berupa perizinan (Imtikhani & Sukirman, 2021). Segala kemudahan dan keuntungan tersebut dapat mendorong perusahaan untuk menjadikan koneksi politik sebagai kesepakatan untuk menguntungkan diri atau biasa disebut kolusi. Kolusi tersebut akan membuat perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan (Kusumosari & Solikhah,

2021). Koneksi politik yang semakin tinggi akan menyebabkan meningkatnya tindakan kecurangan laporan keuangan (Matangkin et al.,2018).

Penggunaan proksi koneksi politik mengacu terhadap penelitian Kusumosari & Solikhah (2021) dan Matangkin Leonardus et al., (2018) berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Isalati Nadhiya Shabrina et al., (2023) menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Penelitian mengenai pendeteksian kecurangan laporan keuangan menggunakan *fraud hexagon* pada sektor BUMN berdasarkan pada penelitian Larum et al., (2021) dalam penelitian tersebut menggunakan 86 sampel BUMN di BEI periode 2016-2019. (1) Menggunakan periode penelitian yang berbeda, jika sebelumnya menggunakan periode 2016-2019 namun pada penelitian ini menggunakan periode 2018-2022. (2) Menggunakan proksi variabel bebas yang berbeda pada variabel tekanan, jika sebelumnya menggunakan *financial stability* sedangkan dalam penelitian ini menggunakan *leverage*. (3) Menggunakan proksi variabel terikat yang berbeda, jika sebelumnya menggunakan *M-Score*, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan *F-Score* yang adalah teknik untuk mengukur kecurangan laporan keuangan yang memiliki tingkat akurasi tinggi. Sedangkan persamaannya yaitu, (1) Menggunakan proksi variabel bebas yang sama pada variabel kompetensi yakni perubahan direksi, peluang yakni ketidakefektifan pengawasan, rasionalisasi yakni pergantian auditor, arogansi yakni jumlah foto CEO dan kolusi yakni koneksi politik.

Penelitian ini dilakukan karena adanya inkonsistensi hasil dan keterbatasan pada penelitian terdahulu. Penggunaan proksi yang berbeda-beda untuk mengukur *fraud hexagon* pada penelitian terdahulu, menjadi alasan bagi peneliti untuk menggunakan *fraud hexagon* pada penelitian ini, sehingga dapat diketahui proksi yang dapat menerangkan model yang sedang diteliti secara lebih jelas. Kemudian hingga saat ini masih sedikit penelitian yang memakai *fraud hexagon* yang merupakan pengembangan dari *triangle fraud*, *diamond fraud* dan *pentagon fraud* dalam melakukan pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan di BUMN, padahal kasus kecurangan keuangan di BUMN itu sendiri masih sering terjadi. Berdasarkan uraian dan latar belakang kasus/fenomena mengenai kecurangan dalam laporan keuangan yang telah dijelaskan diatas, masih terdapat *research gap* dari hasil penelitian-penelitian terdahulu serta penggunaan proksi dari variabel yang , populasi serta sampel yang berbeda dari berbagai peneliti sebelumnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Berdasarkan *Fraud Hexagon* (Studi Kasus : Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam kaitanya dengan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang ada, diantaranya:

1. Association of Certified Fraud Examiners (2022) menyatakan bahwa pada tahun 2022 indonesia masih berada di peringkat keempat dengan jumlah kasus fraud terbanyak yaitu 23 kasus dari 194 kasus yang terjadi di Asia Pasifik.

2. Association of Certified Fraud Examiners (2019) menunjukkan fakta bahwa lembaga yang paling dirugikan akibat fraud adalah 48,5% berasal dari lembaga pemerintah, kemudian 31,8% berasal dari perusahaan negara (BUMN) dan 15,1% berasal dari lembaga swasta, sedangkan untuk sektor industri yang paling dirugikan akibat fraud sebanyak 33,9% berasal dari perusahaan yang berstatus BUMN.
3. Thohir (2020) menyatakan bahwa banyak perusahaan BUMN berani melakukan manipulasi laporan keuangan dengan mempercantik laporan keuangan tersebut atau yang dikenal dengan *window dressing*. Perusahaan BUMN selalu berusaha untuk memperlihatkan laporan keuangannya terlihat baik tetapi kenyataannya perusahaan tidak sedang dalam keadaan baik. Hal ini diperjelas dengan banyaknya kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi dalam perusahaan BUMN.
4. Terdapat lima BUMN yang terdaftar di BEI yang melaksanakan kecurangan pelaporan keuangan yaitu PT Asuransi Jiwasraya Tahun 2018 (Thohir, 2020) yang diduga mempercantik laporan keuangannya dengan membeli saham lapis kedua dan ketiga menjelang akhir periode. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 (Hartomo, 2019) yang dimana dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan terlibat dalam praktik kecurangan. PT Indofarma Tbk (Finance, 2004). PT KAI (Persero) dan PT Kimia Farma Persero Tbk (Sandria, 2021).
5. Mengenai pengaruh masing-masing proksi variabel dalam penelitian yang berkaitan dengan pendeteksian kecurangan laporan keuangan dengan memakai teori *hexagon fraud* masih terdapat perbedaan hasil penelitian.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, tidak semua masalah yang teridentifikasi akan dibahas. Penelitian ini dibatasi pada masalah dari faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan dengan *tekanan* diproksikan dengan *leverage*; *kompetensi* diproksikan dengan *pergantian direksi*; *peluang* diproksikan dengan *ketidakefektifan pengawasan*; *rasionalisasi* diproksikan dengan *pergantian auditor*; *arogansi* diproksikan dengan *frekuensi kemunculan gambar CEO* dan *kolusi* diproksikan dengan *koneksi politik*. Selain itu, penelitian ini juga dibatasi pada pemilihan sampel dan periode penelitian. Sampel yang digunakan adalah pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian tahun 2018-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *tekanan* berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah *kompetensi* berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah *peluang* berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah *rasionalisasi* berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan?
5. Apakah *arogansi* berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan?

6. Apakah *kolusi* berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *tekanan* dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *kompetensi* dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *peluang* dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh *rasionalisasi* dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.
5. Untuk mengetahui pengaruh *arogansi* dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.
6. Untuk mengetahui pengaruh *kolusi* dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan melalui hasil dari penelitian ini dapat membrikan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan wawasan, ilmu, dan dapat memberikan liberatur tambahan yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan

ataupun penelitian lainnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman dan gambaran yang lebih mendalam mengenai cara mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan dengan menggunakan teori *hexagon fraud*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan pada praktik akuntansi seperti auditor dan akuntan untuk bisa melakukan tindakan prevektif dan deteksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi *stakeholder* agar bisa mencegah mengalami kerugian dengan cara mendeteksi kecurangan laporan keuangan sedini mungkin.

